

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.04/2005

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [291/KMK.05/1997](#) TENTANG KAWASAN BERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif pada industri/industri penunjang khususnya bidang usaha pertambangan, minyak dan gas, serta PDKB yang bergerak di bidang industri perminyakan dan gas, perkapalan di dalam negeri dan industri oleochemical serta menunjang iklim investasi yang konsisten dan berkepastian hukum maka dipandang perlu untuk mengatur kembali aturan Kawasan Berikat dengan aturan yang lebih fleksibel;
- b. bahwa dalam BTBMI terdapat beberapa produk barang jadi yang tarif bea masuknya lebih rendah daripada tarif bea masuk bahan bakunya padahal dalam ketentuan kawasan berikat salah satu kemudahan yang diberikan untuk penjualan ke DPIL adalah dengan menggunakan tarif bea masuk bahan baku, sehingga dipandang perlu untuk memberikan pilihan kepada pengusaha kawasan berikat dalam menentukan metode penghitungan bea masuk yang lebih rendah sesuai filosofi pemberian kemudahan kepada pengusaha kawasan berikat;
- c. bahwa dengan berakhirnya ketentuan yang mengizinkan PDKB untuk menerima pekerjaan subkontrak dari DPIL dan demi kepastian hukum untuk berusaha maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang penerimaan pekerjaan sub kontrak dari DPIL yang diharapkan lebih memberi kesempatan kepada industri di DPIL untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan PDKB.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor [291/KMK.05/1997](#) tentang Kawasan Berikat;

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996](#) tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003](#) Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah

Peraturan Menteri Keuangan, 101/PMK.04/2005

diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514);

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [291/KMK.05/1997](#) tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [587/PMK.04/2004](#);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [583/KMK.03/2003](#) tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [584/KMK.04/2003](#) tentang Pemasukan Barang Dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [16/PMK.03/2005](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [291/KMK.05/1997](#) TENTANG KAWASAN BERIKAT.

Pasal 1

Keputusan Menteri Keuangan No. [291/KMK.05/1997](#) tentang Kawasan Berikat yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan :

- a. Nomor [547/KMK.01/1997](#);
- b. Nomor [292/KMK.01/1998](#);
- c. Nomor [349/KMK.01/1999](#);
- d. Nomor [94/KMK.05/2000](#);
- e. Nomor [37/KMK.04/2002](#);
- f. Nomor [587/PMK.04/2004](#);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dapat dilakukan dengan tujuan :
- a. Ekspor;
 - b. KB lainnya;
 - c. PDKB dalam satu KB;
 - d. Entrepot Tujuan Pameran (ETP); atau
 - e. DPIL

- (2) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) (formulir BC 3.0/BC3.1) dan formulir BC 2.3 dan diberlakukan ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor.
- (3) Pengeluaran barang asal impor yang tidak diolah di KB dan akan diekspor kembali dilakukan dengan menggunakan PEBT dan formulir BC 2.3.
- (4) Pengeluaran barang hasil pengolahan dari KB ke KB lainnya untuk diolah lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri kontrak pembelian.
- (5) Pengeluaran barang hasil pengolahan dari PDKB ke PDKB lainnya dalam satu KB untuk diolah lebih lanjut atau untuk pengepakan hasil produksi, dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri kontrak pembelian.
- (6) Pengeluaran barang hasil olahan dari PDKB ke ETP, dilakukan dengan menggunakan BC 2.3.

(7) Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB dengan tujuan ke DPIL, dapat dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC 2.0/BC 2.5) sesuai dengan tatalaksana kepabeanan di bidang impor dengan ketentuan sebagai berikut:

- (8) **u. Pengeluaran** barang sebagai modal atau alat produksi yang digunakan untuk kegiatan usaha, yang meliputi:
 - (2) **alat-alat** dan **peralatan** yang digunakan untuk kegiatan usaha;
 - (6) **barang** yang digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11A

- (1) **Pengusaha** yang melakukan kegiatan usaha di kawasan Berikat dapat menggunakan fasilitas pembebasan bea cukai dan pajak yang berlaku di kawasan Berikat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha di kawasan Berikat, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 14 huruf I diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;
- b. atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;

- c. atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
 - d. atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
 - e. atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
 - f. atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
 - g. atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
 - h. atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
 - i. atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan pembebasan Cukai;
 - j. penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor;
 - k. pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;
 - l. atas pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat Bantu pengemas dari DPIL ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
- (2) Dasar perhitungan pungutan negara atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (3) d. ~~PKB~~ bila
Pembelian barang
Pabean di KB
dilakukan oleh
Direktoran
Jenderal Bea dan
Cukai
pajak bea
masuk
berikutnya

5. Di antara pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

~~pekerjaan~~
~~yang~~
~~di~~
~~di~~

"Pasal 23A

- (1) Atas barang modal
dan barang peralatan
pabrik asal impor
milik, ~~PKB~~
dan/atau ~~PDKB~~,
apabila telah
melampaui jangka
waktu 2 (dua)
tahun sejak
dimasukkan ke
kawasan berikat
dapat
dipindahkan
ke Daerah Pabean
Indonesia Lainnya
dengan tanpa
kewajiban
membayar bea
masuk

- (2) Pemindahan
barang modal dan
peralatan pabrik
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) sebelum
jangka waktu 2
(dua) tahun sejak
dimasukkan ke
kawasan berikat,
dikenakan:

(3) Bagaimanakah dari bulan sebagai...
dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dihipotesiskan sebagai satu barang penuh."

huddal
dari

Pasal II

- (1) Permasalahan yang timbul berkaitan dengan tarif, pembebasan dan prosentase penjualan atas barang-barang hasil produksi PDKB ke DPIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997, yang merupakan hasil pemeriksaan verifikasi maupun audit, yang belum selesai pada saat diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

dijadikan
permohonan
pengeluaran
dari
kawasan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2005
MENTERI KEUANGAN,
genap

ttd.
(dua)
tahun

JUSUF ANWAR
sejak
dimasukkan
ke
kawasan
berikat.